

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY***ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT OF THE NORTH SULAWESI PROVINCIAL GOVERNMENT BASED ON THE CONCEPT OF VALUE FOR MONEY*

**Immanuel R. A. Polii<sup>1</sup>**  
**David P. E. Saerang<sup>2</sup>**  
**Steven J. Tangkuman<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

[<sup>1</sup>angeloirpolii@gmail.com](mailto:angeloirpolii@gmail.com)

[<sup>2</sup>dpesaerang@gmail.com](mailto:dpesaerang@gmail.com)

[<sup>3</sup>stevenjosiatangkuman@gmail.com](mailto:stevenjosiatangkuman@gmail.com)

**Abstrak:** Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan konsep *value for money* yaitu dilihat dari segi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menggunakan rasio ekonomi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015-2017 sudah ekonomis, karena menghasilkan rasio lebih dari 100%. Rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan dinilai efisien, karena hasil perhitungan rasio yang diperoleh berada diantara 90% sampai 99%. Rasio efektivitas menunjukkan kinerja keuangan yang dikategorikan cukup efektif, karena hasil perhitungan rasio yang diperoleh berada diantara 85% sampai 99%.

**Kata Kunci:** Pengukuran, kinerja keuangan, *value for money*.

**Abstract:** Measurement of financial performance is very important to assess the accountability of local governments in carrying out regional financial management. The purpose of this study is to measure the financial performance of the North Sulawesi Provincial Government based on the concept of value for money in terms of economy, efficiency and effectiveness. The analytical method used in this research is descriptive qualitative in the form of case studies to measure the financial performance of the North Sulawesi Provincial Government. The results of the study using economic ratios indicate that the financial performance of the North Sulawesi Provincial Government in 2015-2017 is already economical, because it produces a ratio of more than 100%. Efficiency ratios indicate financial performance is rated efficient, because the calculation results obtained ratios are between 90% to 99%. Effectiveness ratios indicate that financial performance is categorized quite effective, because the calculation results obtained ratios are between 85% to 99%.

**Keywords:** Measurement, financial performance, *value for money*.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola daerah sendiri merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah lebih mampu dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar. Pemerintah wajib untuk menyerahkan atau melaporkan pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk dilihat dan dinilai apakah pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah sudah baik atau belum. Perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap pemerintah daerah agar dapat diketahui tingkat keberhasilannya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. APBD dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Anggaran dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan di daerah masing-masing.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diukur menggunakan konsep *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi adalah pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros. Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri agar sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan daerahnya dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Sya'diyah et al. (2016) dengan judul "Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode *value for money* dengan menggunakan rasio ekonomi menunjukkan kriteria sangat ekonomis, rasio efisiensi menunjukkan kriteria efisien, dan rasio efektivitas menunjukkan kriteria sangat efektif. Dengan demikian penelitian serupa dapat dilakukan kembali di lingkungan organisasi sektor publik lainnya. Untuk itu penelitian ini akan dilakukan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan konsep *value for money* dengan menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015-2017 ditinjau dari segi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas berdasarkan konsep *value for money*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan Negara dari anggaran sampai pelaksanaan dan pelaporan termasuk pengaruh yang ditimbulkan (Sujarweni, 2015:18). Akuntansi pemerintah termasuk juga lembaga-lembaga non profit mengkhususkan pada masalah dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi non profit lainnya. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat mengenai aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta

membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Sadeli, 2015:6).

### Kinerja Keuangan

Menurut Sijabat et al. (2013:239), kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintahan daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Fahmi (2012:2) yang dimaksud dengan kinerja keuangan adalah hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi tertentu telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010:112).

### Value For Money

Menurut Mahmudi (2013:83), *value for money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana *value for money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. *Value for money* menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Tuntutan masyarakat dalam *value for money* adalah ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam arti bahwa penggunaan atau pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran.

### Pengukuran Ekonomi

Mahmudi (2013:83-84) menjelaskan bahwa, ekonomi terkait dengan pengkonversian *input* berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi *input* sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah (*spending less*), yaitu harga yang mendekati harga pasar. Secara sistematis, ekonomi merupakan perbandingan antara *input* dengan nilai rupiah untuk memperoleh *input* tersebut. Tingkat ekonomi dapat dilihat dengan mengukur perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasi belanja dengan persentase tingkat pencapaiannya.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

### Pengukuran Efisiensi

Mahmudi (2013:85) menjelaskan, efisiensi terkait dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output per unit input*. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Tingkat efisiensi dapat dilihat dengan mengukur perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

### Pengukuran Efektivitas

Mahmudi (2013:86) menjelaskan bahwa, efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *outcome* dengan *output*. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (*spending wisely*). Tingkat efektivitas dapat dilihat dengan mengukur perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggarannya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

### **Anggaran Sektor Publik**

Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter (Mahsun, 2013:145). Anggaran sektor publik yaitu anggaran yang dipresentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana keuangan dimasa datang mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan (Mahmudi, 2018:60).

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun struktur APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, terdiri dari 3 bagian yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Siregar (2015:82) menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola pemerintah dalam suatu periode.

### **Penelitian Terdahulu**

Indrayani dan Khairunnisa (2018), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). Hasil penelitiannya menunjukkan kinerja pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2014-2016 bernilai ekonomis, secara keseluruhan telah efisien, sedangkan hasil rasio efektivitas menunjukkan kinerja pada tahun tersebut dinilai tidak efektif.

Waney et al. (2018), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa pengelolaan anggaran belanja di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara memiliki kriteria efektivitas yang bervariasi dan kriteria efisiensi secara keseluruhan sudah diolah dengan baik.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan berupa studi kasus dengan metode penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan penelitian terhadap suatu objek di mana hasil penelitian tersebut hanya berlaku bagi objek tempat penelitian dilakukan dan dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan konsep *value for money*, sehingga hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

### **Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan mengambil data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Utara. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Juli 2019 sampai dengan selesai.

### **Jenis, Sumber Dan Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa hasil wawancara yang berkaitan dengan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan data kuantitatif yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015-2017. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung

dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi.

### Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dalam bentuk studi kasus yaitu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasi, menafsirkan serta menyimpulkan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang dihadapi atau yang diteliti. Penelitian ini mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan konsep *value for money* dengan menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.

### Proses Analisis

Proses analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menganalisis kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan konsep *value for money* untuk mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.
3. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh maka penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2015-2017.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 untuk mengukur kinerja keuangan berdasarkan konsep *value for money* yaitu dengan menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

### Rasio Ekonomi

Rasio Ekonomi merupakan perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasi belanja. Data anggaran belanja dan realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2015-2017 dan hasil perhitungan rasio ekonomi disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Ekonomi**

| Tahun | Anggaran Belanja (Rp) | Realisasi Belanja (Rp) | Rasio Ekonomi |
|-------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 2015  | 2.906.338.366.339     | 2.693.083.788.018      | 107,91%       |
| 2016  | 2.986.450.969.444     | 2.801.145.395.510      | 106,61%       |
| 2017  | 3.852.822.284.520     | 3.580.571.793.429      | 107,60%       |

Sumber: Data diolah, 2019

### Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan. Data realisasi belanja dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2015-2017 dan hasil perhitungan rasio efisiensi disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi**

| Tahun | Realisasi Belanja (Rp) | Realisasi Pendapatan (Rp) | Rasio Efisiensi |
|-------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| 2015  | 2.693.083.788.018      | 2.527.959.070.031         | 106,53%         |
| 2016  | 2.801.145.395.510      | 2.885.186.120.406         | 97,08%          |
| 2017  | 3.580.571.793.429      | 3.731.901.683.007         | 95,94%          |

Sumber: Data diolah, 2019

### Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Data realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2015-2017 dan hasil perhitungan rasio efektivitas disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas**

| Tahun | Realisasi Pendapatan (Rp) | Anggaran Pendapatan (Rp) | Rasio Efektivitas |
|-------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2015  | 2.527.959.070.031         | 2.640.629.706.400        | 95,73%            |
| 2016  | 2.885.186.120.406         | 2.910.867.027.492        | 99,11%            |
| 2017  | 3.731.901.683.007         | 3.723.697.617.672        | 100,22%           |

Sumber: Data diolah, 2019

### Pembahasan

#### Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Segi Ekonomi

Kinerja pemerintah daerah dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai lebih dari seratus persen. Semakin besar rasio ekonomi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Kriteria ekonomi dalam pengukuran kinerja keuangan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan persentase penilaian sebagai berikut: (a) lebih dari 100% berarti ekonomis; (b) 85% sampai dengan 100% berarti cukup ekonomis; (c) 65% sampai dengan 84% berarti kurang ekonomis; (d) kurang dari 65% berarti tidak ekonomis. Perkembangan rasio ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2015-2017 cukup konsisten berada pada kategori ekonomis, walaupun terjadi fluktuasi persentase setiap tahunnya. Pada tahun anggaran 2015 ke tahun anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar 1,3%, yaitu dari 107,91% menjadi 106,61%. Pada tahun anggaran 2016 ke tahun anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,99%, yaitu dari 106,61% menjadi 107,60%. Hasil pengukuran kinerja keuangan berdasarkan konsep *value for money* dengan menggunakan rasio ekonomi menunjukkan bahwa tingkat ekonomis pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selama periode tahun 2015-2017 rata-rata sekitar 107,37%. Rasio ekonomi yang dihasilkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selama 3 tahun tersebut dinilai ekonomis, karena hasil perhitungan rasio yang diperoleh lebih dari 100%. Hasil analisis menggunakan rasio ekonomi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selama tiga tahun berturut-turut sudah mencapai kinerja yang baik, karena dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah berhasil mengelola penggunaan anggaran belanja dengan baik. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan konsep *value for money* dikatakan ekonomis, karena belanja yang direalisasikan lebih sedikit dibandingkan dengan yang dianggarkan. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros.

#### Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Segi Efisiensi

Kinerja pemerintah daerah akan semakin efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Kriteria efisiensi dalam pengukuran kinerja keuangan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan persentase penilaian sebagai berikut: (a) kurang dari 90% berarti sangat efisien; (b) 90% sampai dengan 99% berarti efisien; (c) 100% berarti cukup efisien; (d) lebih dari 100% berarti tidak efisien. Perkembangan rasio efisiensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan persentase dari tahun 2015-2017 yang berarti kinerjanya semakin efisien dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 2015 ke tahun anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar 9,45%, yaitu dari 106,53% menjadi 97,08%. Pada tahun anggaran 2016 ke tahun anggaran 2017 mengalami penurunan sebesar 1,14%, yaitu dari 97,08% menjadi 95,94%. Hasil pengukuran kinerja keuangan berdasarkan konsep *value for money* dengan menggunakan rasio efisiensi menunjukkan bahwa tingkat efisien Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selama periode tahun 2015-2017 rata-rata sekitar 99,85%. Rasio efisiensi yang dihasilkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selama 3 tahun tersebut dinilai efisien, karena hasil perhitungan rasio yang diperoleh berada diantara 90% sampai 99%. Hasil analisis menggunakan rasio efisiensi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara setiap tahunnya mengalami penurunan persentase yang berarti kinerjanya semakin efisien dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan konsep *value for money* dikatakan efisien, karena berhasil meningkatkan pendapatan melebihi realisasi belanjanya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan minimum untuk mencapai target yang maksimum.

### **Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Segi Efektivitas**

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kriteria efektivitas dalam pengukuran kinerja keuangan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan persentase penilaian sebagai berikut: (a) lebih dari 100% berarti efektif; (b) 85% sampai dengan 99% berarti cukup efektif; (c) 65% sampai dengan 84% berarti kurang efektif; (d) kurang dari 65% berarti tidak efektif. Perkembangan rasio efektivitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan persentase dari tahun 2015-2017 yang berarti kerjanya semakin efektif dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 2015 ke tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar 3,38%, yaitu dari 95,73% menjadi 99,11%. Pada tahun anggaran 2016 ke tahun anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,11%, yaitu dari 99,11% menjadi 100,22%. Hasil pengukuran kinerja keuangan berdasarkan konsep *value for money* dengan menggunakan rasio efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektif Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selama periode tahun 2015-2017 rata-rata sekitar 98,35%. Rasio efektivitas yang dihasilkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selama 3 tahun tersebut dinilai cukup efektif, karena hasil perhitungan rasio yang diperoleh berada diantara 85% sampai 99%. Hasil analisis menggunakan rasio efektivitas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara setiap tahunnya mengalami kenaikan persentase yang berarti kerjanya semakin efektif dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan konsep *value for money* dinilai semakin efektif dari tahun ke tahun dengan semakin tingginya rasio efektivitas yang dihasilkan, sehingga pada tahun 2017 mendapatkan hasil perhitungan rasio efektivitas sebesar 100,22% yang berarti kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dikategorikan efektif dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil meningkatkan pemerolehan realisasi pendapatan lebih besar daripada pendapatan yang dianggarkan. Hal ini mengartikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menentukan target pendapatan telah sesuai, dan mampu merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Rasio ekonomi dari tahun 2015-2017 menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinilai ekonomis, karena menghasilkan rasio lebih dari 100% dengan rata-rata sebesar 107,37%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil mengelola penggunaan anggaran belanja dengan baik dan dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros.
2. Rata-rata rasio efisiensi tahun 2015-2017 adalah sebesar 99,85% yang menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinilai efisien, karena hasil perhitungan rasio yang diperoleh berada diantara 90% sampai 99%. Artinya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan minimum untuk mencapai target yang maksimum dan berhasil meningkatkan pendapatan melebihi realisasi belanjanya.
3. Rasio efektivitas dari tahun 2015-2017 menunjukkan kinerja yang dikategorikan cukup efektif karena hasil perhitungan rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 98,35%. Kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinilai cukup efektif dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target anggaran pendapatan yang ditetapkan sebelumnya, karena hasil perhitungan rasio yang diperoleh berada diantara 85% sampai 99%. Tetapi, pemerintah telah berusaha dalam pencapaian kinerja yang semakin efektif dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Hal ini ditunjukkan dari perkembangan rasio efektivitas yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat dikategorikan efektif karena mampu mencapai rasio sebesar 100,22%.

#### **Saran**

Memperhatikan hasil analisis kinerja keuangan berdasarkan konsep *value for money* dengan menggunakan pengukuran rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara disarankan untuk dapat mempertahankan kemampuan atau kerjanya dalam merealisasikan

anggaran dan perlu untuk terus meninjau penentuan target-target selanjutnya atau yang akan datang agar rasio dapat tetap bertahan atau bahkan bisa lebih meningkat lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, I. (2012). Analisis kinerja keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Indrayani & Khairunnisa. 2018. Analisis pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep *value for money* pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (studi kasus pada DPKAD Kota Lhokseumawe periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/10.29103/jak.v6i1.1820>
- Mahmudi. (2013). Manajemen kinerja sektor publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2018). Akuntansi sektor publik. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, M. (2013). Pengukuran kinerja sektor publik. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sadeli, L. M. (2015). *Accounting theory*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sijabat, M. Y., Shaleh, C., & Wachid, A. (2013). Analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 236-242. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/365>
- Siregar, B. (2015). Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah berbasis akrual. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi sektor publik. Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia). Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/16992/NDC5ODU=/Pengaruh-Karakteristik-Pemerintah-Daerah-Terhadap-Kinerja-Kuangan-Pemerintah-Daerah-Hendro-Sumarjo.pdf>
- Sya'diyah, K., Susanti, W., & Rasyidi, A. (2016). Analisis *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Akuntansi Equity*, 2(4), 9-20. <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/192>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Waney, C., Saerang, D., & Alexander, S. (2018). Analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 334-341. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19527.2018>